



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk pengarahan kepada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi Kepala-kepala Negara/Pemerintahan ke VII Negara-negara Non-Blok yang diadakan di New Delhi, India, tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret 1983.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia selaku ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi Kepala-kepala Negara/Pemerintahan ke VII Negara-negara Non-Blok.

Untuk :

PERTAMA : Memperhatikan petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Tingkat Tinggi Kepala-kepala Negara/pemerintahan ke VII Negara-negara Non-Blok yang diadakan di New Delhi, India tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret 1983.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama berlangsungnya konperensi tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi Kepala-kepala Negara/Pemerintahan ke VII Negara-negara Non-Blok yang diadakan di New Delhi, India, tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 11 Maret 1983.

KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

PETUNJUK-PETUNJUK PENGARAHAN BAGI DELEGASI REPUBLIK
INDONESIA KE KONPERERSI TINGKAT TINGGI KEPALA-KEPALA
NEGARA PEMERINTAHAN KE VII NEGARA-NEGARA NON-BLOK
DI NEW DELHI, INDIA, TANGGAL 1- 11 MARET 1983

I. PENDAHULUAN

1. Gerakan Non-Blok Iahir sebagai forum negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya di segala bidang, dalam menghadapi polarisasi negara-negara di dunia ke dalam blok-blok di bawah pengaruh negara-negara besar. Oleh karena itu, gerakan ini merupakan suatu kekuatan yang bebas dan tidak terikat kepada salah satu blok. Sejak semula Gerakan Non-Blok mendasarkan perjuangannya pada asas-asas menentang Imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, ekspansionisme, apartheid, rasialisme, pemerasan, politik kekuatan dan segala bentuk dorninasi serta hegemoni. Asas-asas ini, pada hakekatnya bersumber pada Dasasila Bandung yang dihasilkan oleh Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.
2. Gerakan Non-Blok merupakan wadah perjuangan bersama negara-negara berkembang dalam usaha mewujudkan tata kehidupan bangsa-bangsa yang lebih adil dalam suasana perdamaian dan persamaan derajat. Berbagai pembahasan masalah-masalah dunia yang penting sering diprakarsai dalam forum-forum Non-Blok, yang kemudian dilanjutkan dengan perjuangan untuk mewujudkannya di forum-forum Internasional lainnya baik di PBB ataupun badan-badan di luar PBB. Perjuangan untuk mempercepat penghapusan penjajahan, rasialisme dan apartheid dari muka bumi, usaha-usaha untuk mengadakan Konperensi PBB mengenai perlucutan senjata dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia serta perdamaian dunia serta pencetusan cita-cita Tata Ekonomi Dunia Baru, merupakan masalah-masalah penting yang pembahasannya diprakarsai Gerakan Non-Blok.
3. Namun demikian, perkembangan Gerakan Non-Blok akhir-akhir ini memperlihatkan tanda-tanda yang memprihatinkan. prinsip-prinsip yang menjiwai Gerakan Non-Blok terasa goyah. Salah pengertian dan perselisihan yang timbul dari perbedaan kepentingan nasional berbagai negara anggota, telah melengahkan rasa persatuan, kesatuan, dan kesetiakawanan serta mengaburkan kemurnian semangat dan tujuan Gerakan ini.
4. Konperensi Tingkat Tinggi di New Delhi ini akan ditandai oleh berbagai situasi sebagai berikut :
 - a. Adanya perpecahan di kalangan negara-negara anggota sendiri sehingga mengakibatkan pengelompokan-pengelompokan dan mungkin saling konfrontasi.
 - b. Adanya pertentangan dan konflik terbuka di antara negara anggota Non-Blok sendiri yang sangat membahayakan persatuan dan keutuhan Gerakan.

- c. Adanya usaha-usaha dari beberapa negara untuk membelokkan Gerakan ini dan melibatkannya terhadap salah satu blok.
5. Mengingat pentingnya peranan Gerakan Non-Blok dalam usaha mewujudkan cita-cita negara berkembang, serta perkembangan-perkembangan yang mengancam kesinambungan semangat, tujuan dan prinsip-prinsipnya yang murni, yang kesemuanya membahayakan persatuan, kesatuan serta kesetiakawanan Gerakan ini, maka partisipasi Indonesia di dalam Konferensi Tingkat Tinggi New Delhi ini sangat penting.

II. UMUM

1. Sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk pembangunan di segala bidang dan sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non-Blok, Indonesia perlu secara aktif memperjuangkan kemurnian prinsip-prinsip, tujuan dan semangat Gerakan Non-Blok sebagaimana dicetuskan oleh para pendirinya dalam tahun 1961.
2. Dunia yang kita hadapi saat ini dan masalah-masalah pokoknya sudah berubah dan berlainan. Dewasa ini masalah yang paling besar dan mendesak adalah bagaimana menaikkan taraf hidup rakyat dari negara-negara dunia ketiga yang merupakan bagian terbesar dari umat manusia. Perjuangan ini tidak kalah pentingnya dengan perjuangan politik Gerakan Non-Blok dahulu, yaitu membebaskan dunia dari belenggu kolonialisme. Karena itu Gerakan Non-Blok memusatkan diri pada perjuangan untuk membentuk Tata Ekonomi Dunia Baru. Potensi untuk ini jelas ada, sebab dunia ketiga umumnya kaya dengan sumber bahan mentah dan bahan-bahan strategis lainnya, serta potensi penduduknya besar, yang kesemuanya membuka banyak kemungkinan di masa mendatang. Yang diperlukan adalah satuan dan kesatuan serta kesetiakawanan di antara semua negara-negara anggota Non-Blok. Dan jaminan ke arah itu tidak lain adalah kembali kepada kemurnian prinsip-prinsip, tujuan dan semangat Gerakan Non-Blok.
3. Kemurnian prinsip-prinsip, tujuan dan semangat Gerakan Non-Blok seperti di atas, dalam garis besarnya perlu ditekankan melalui :
 - a. Penegasan kembali prinsip-prinsip, tujuan dan semangat tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di Kairo tahun 1961. Dalam hubungan ini perlu sekali ditekankan peranan Gerakan Non-Blok sebagai faktor yang berpengaruh dalam hubungan Internasional dan mempunyai kekuatan moral dan politik dalam percaturan dunia.
 - b. Penerapan atau pelaksanaan prinsip-prinsip itu secara nyata dalam politik masing-masing negara pada pergaulan internasional.
4. Usaha mempertahankan prinsip-prinsip, tujuan dan semangat Non-Blok secara murni hendaklah dilakukan bekerjasama dengan negara-negara pendiri dan negara-negara sehaluan lainnya di dalam forum ini.

5. Mengingat persatuan dan solidaritas di antara anggota-anggotanya adalah sumber utama kekuatan Gerakan Non-Blok dalam melaksanakan perjuangan di arena Internasional, maka persatuan dan solidaritas di kalangan anggota-anggotanya perlu dipelihara, dipelihara dan ditingkatkan.
6. Di dalam memperkuat persatuan dan solidaritas di antara para anggotanya, hendaklah diusahakan agar Gerakan memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah pokok yang merupakan kepentingan bersama dan sebaiknya menjauhkan diri dari persoalan-persoalan kontroversial di antara sesama anggotanya.
7. Partisipasi Indonesia dalam forum Non-Blok sebagai forum kerjasama ekonomi negara-negara berkembang hendaknya dapat diarahkan dan dimanfaatkan untuk memberikan pengisian kepada Gari-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang ditujukan baik untuk menunjang usaha-usaha pembangunan nasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya, maupun untuk memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama di antara anggota-anggota masyarakat internasional dalam mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru.
8. Usaha dan perjuangan Delegasi RI di bidang ekonomi dalam forum Ini hendaknya juga diarahkan untuk menciptakan "kemandirian bersama" di antara negara-negara anggotanya. Dalam hubungan ini, posisi Indonesia hendaknya senantiasa memperhatikan dan diserasikan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rangka kerjasama ekonomi ASEAN. Bahkan sejauh mungkin dapat menunjang usaha-usaha kerjasama ekonomi dan sosial budaya ASEAN.
9. Dalam menghadapi isu-isu di bidang ekonomi, sosial budaya yang bersifat global, hendaknya Indonesia memperhatikan strategi, posisi dan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh negara-negara berkembang yang lain.

III. PENGARAHAN MENGENAI BEBERAPA MASALAH POKOK

A. BIDANG POLITIK

1. Suasana internasional dewasa ini lebih menjadi suram dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, khususnya jika dibandingkan dengan suasana pada waktu diadakan KTT ke-6 di Havana. Hubungan antara negara-negara besar masih tetap memburuk dan karena itu mempunyai pengaruh yang sangat negatif baik segala aspek kehidupan Internasional. Lebih dari itu dewasa ini pertentangan-pertentangan dan konflik bersenjata masih saja berlangsung di berbagai kawasan seperti di Asia Barat Daya, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Tengah yang sangat membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional.
2. Sejak Gerakan Non-Blok didirikan tahun 1961, kita menyadari bahwa perdamaian dan keamanan internasional tetap merupakan hal yang sangat penting. Karena itu

kita selalu mendesak secara keras dengan harapan akan tercapainya proses peredaaan ketegangan (detente) di seluruh kawasan di dunia.

Namun sebaliknya, kita menyaksikan timbulnya kembali perang dingin dalam bentuk baru antara negara-negara besar yang telah mengakibatkan sangat mundurnya semangat detente.

3. Usaha negara-negara Non-Blok ke arah tercapainya perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh, khususnya untuk menghapuskan senjata-senjata nuklir sampai sekarang belum juga mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan sebaliknya kini dapat disaksikan peningkatan pacuan senjata serta meningkatnya persenjataan nuklir dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.
4. Situasi yang mencemaskan tersebut telah mengakibatkan terganggunya proses pembangunan negara-negara berkembang. Lebih menyedihkan lagi adanya pertentangan dan konflik bersenjata antara sesama anggota Gerakan Non-Blok sendiri.
5. Menghadapi keadaan Internasional semacam itu hendaknya diusahakan agar Gerakan Non-Blok meningkatkan peranannya dengan mendasarkannya pada prinsip-prinsip murni Gerakan Non-Blok antara lain :
 - a. Memperluas ruang lingkup detente secara global.
 - b. Menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dengan jalan damai, untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri sesuatu negara, tidak menggunakan ancaman dan kekerasan dan menghormati kemerdekaan, kedaulatan serta keutuhan wilayah sesuatu negara
 - c. Meningkatkan usaha dan peranan Non-Blok dalam rangka mewujudkan Tata Dunia Baru, yang lebih dapat mencerminkan aspirasi, khususnya negara-negara dunia ketiga.
 - d. Meningkatkan kerjasama di antara negara-negara, khususnya di antara negara-negara berkembang sendiri di segala bidang.
6. Khususnya dalam masalah Timor Timur apabila ada beberapa delegasi negara anggota Non-Blok yang masih mempersoalkannya, Delegasi RI hendaknya mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengusahakan agar secara maksimal KTT tidak menyinggung masalah Timor Timur baik di dalam acara perdebatan umum maupun di dalam deklarasi.
 - b. Mengusahakan agar secara maksimal sebanyak mungkin negara-negara menyokong pendirian indonesia baik dengan menentang maupun dengan menyatakan "*reservation*" mereka terhadap disinggungnya/dimasukkannya masalah Timor Timur di dalam deklarasi KTT.
 - c. Mengambil langkah-langkah pengamanan dalam rangka mencegah segala kemungkinan hadirnya oknum-oknum yang tidak kita inginkan di New Delhi.
7. Mengenai partisipasi wakil Democratic Kampuchea di dalam Gerakan Non-Blok, KTT Havana telah memutuskan untuk mengosongkan sementara kursi Kampuchea dalam Gerakan tersebut dan untuk selanjutnya dltugaskan kepada

Biro Koordinasi untuk membahasnya yang kemudian harus melaporkan hasil tugasnya kepada KTM.

8. Delegasi RI dan banyak negara anggota Non-Blok lainnya pada waktu itu menganggap bahwa keputusan tersebut tidak wajar.
Dalam kenyataannya, RI masih tetap mengakui pemerintahan Democratic Kampuchea. Karena itu RI mengharapkan agar wakil Democratic Kampuchea dapat menduduki kembali kursinya atau sekurang-kurangnya KTT akan menyetujui agar Pangeran Sihanouk dapat berbicara di depan sidang untuk mengemukakan pandangannya.
9. Mengenai yang menyangkut masalah-masalah di kawasan Asia Tenggara khususnya mengenai situasi di kampuchea, Delegasi RI hendaknya mengadakan konsultasi dengan delegasi-delegasi lainnya dari ASEAN yang ikut dalam Gerakan Non-Blok (Malaysia, Singapura dan Philipina) dalam rangka merumuskan sikap bersama untuk menghadapi masalah tersebut.
10. Mengenai masalah Afghanistan sikap kita ialah agar segera dilaksanakan penarikan mundur semua pasukan asing dari Afghanistan, dihormatinya hak rakyat Afghanistan untuk menentukan masa depannya sesuai aspirasi mereka sendiri tanpa campur tangan dari luar.
11. Dalam menghadapi masalah Timur Tengah dan Palestina, sikap Delegasi RI adalah jelas dan konsisten, yaitu:
 - a. Mendukung hak-hak sah rakyat Palestina untuk kembali ke tempat asalnya, menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional dan untuk membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
 - b. Mendukung perjuangan bangsa Arab dan Palestina untuk mendapatkan kembali wilayah mereka yang diduduki secara tidak sah oleh Israel sejak tahun 1967. Mengutuk Israel atas tindakan agresinya terhadap Lebanon yang membawa korban besar berupa kehilangan jiwa di antara penduduk sipil dan kerugian materi. Berpendapat bahwa dengan tindakan itu Israel menunjukkan bahwa ia tidak cinta damai dan ingin memusnahkan PLO, yang merupakan wakil tunggal bangsa Palestina.
 - c. Menentang keras keputusan Israel untuk menjadikan kota suci Jerusalem sebagai ibu kota Israel, demikian pula tindakan Israel untuk merubah wilayah yang mereka duduki secara demografik dan geografik, antara lain dengan mendirikan pemukiman-pemukiman baru.

B. Bidang Ekonomi

1. Dalam usaha untuk mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru, Delegasi RI hendaknya berusaha memelihara dan meningkatkan peranan Gerakan Non-Blok untuk menciptakan tata hubungan ekonomi internasional yang lebih seimbang, dan memperluas partisipasi negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi dunia.

2. Indonesia sependapat dengan pendirian bahwa usaha mengatasi masalah-masalah ekonomi dunia, khususnya yang berupa inflasi, pengangguran dan resesi yang dihadapi oleh masyarakat Internasional terutama oleh negara-negara maju, hanya akan dapat diselesaikan dengan melalui perombakan struktural dari hubungan ekonomi internasional yang ada, penyelesaian secara terbatas dan non-struktural tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia secara tuntas. Dalam hubungan ini Indonesia sangat prihatin atas kemacetan yang berlanjut dalam Negosiasi Global yang merupakan prakarsa negara-negara Non-Blok. Diharapkan agar KTT New Delhi dapat mengadakan peninjauan menyeluruh mengenai masalah ini dan dapat mengusahakan jalan ke luar.
3. Mengingat hasil-hasil atau kemajuan yang dicapai dalam berbagai perundingan sektoral internasional antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang masih sangat terbatas, maka usaha-usaha untuk memperoleh Komitmen politik dari negara-negara maju perlu terus ditingkatkan, khususnya yang menyangkut perombakan struktur pasar internasional bagi komoditi negara-negara berkembang (Program Komoditi Terpadu dengan Dana Bersama), perbaikan perdagangan internasional barang-barang non-komoditi termasuk penghapusan tindakan-tindakan proteksionisme oleh negara-negara maju, perombakan hubungan industri internasional ke arah peningkatan bagian produksi negara-negara berkembang, serta peningkatan pengalihan dan kemampuan teknologi dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang.
4. Di dalam menghadapi usaha-usaha internasional serta Konferensi Internasional yang akan diadakan seperti peluncuran Negosiasi Global, UNCTAD VI, hendaknya terus diadakan penggalangan kesatuan pendapat dan penyusunan posisi bersama di antara negara-negara berkembang.
5. Untuk meningkatkan kemandirian bersama dan memperkuat posisi berunding dari negara-negara berkembang. Indonesia hendaknya terus mengusahakan pelaksanaan dari Program Kerjasama di antara negara-negara Non-Blok dan negara-negara berkembang lainnya sebagaimana telah digariskan dalam Program Aksi Havana dan Program Aksi Caracas.
Dalam hubungan ini, Delegasi RI hendaknya mengusahakan agar pelaksanaan program kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada kepentingan nasional.

IV. HAL-HAL LAIN

1. Masalah-masalah lain yang tidak dicantumkan dalam Petunjuk ini, termasuk hal-hal khusus yang timbul dalam tiap-tiap mata acara Konferensi Tingkat Tinggi ke VII ini, ataupun masalah-masalah lain yang timbul dalam persidangan, diserahkan keputusannya kepada Ketua Delegasi RI, sedapat mungkin setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden.

2. Dalam waktu satu bulan setelah tiba kembali di Jakarta, Delegasi RI supaya menyampaikan laporan lengkap tentang hasil-hasil Konperensi tersebut kepada Presiden.

Jakarta, 28 Februari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO